



Pranatan Anyar



TES COVID-19 BERBIAYA MURAH

Dorong Geliat Pariwisata DIY

YOGYA (KR) - Geliat industri pariwisata di DIY di tengah pandemi Covid-19 sudah nampak sejak akhir 2020. Pariwisata DIY telah siap dengan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 secara ketat.

Karena itu, Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) DIY berharap adanya kesadaran bersama baik Pemerintah maupun masyarakat dalam melaksanakan mekanisme protokol kesehatan pencegahan Covid-19 dengan tepat dan baik, agar industri pariwisata bisa bangkit kembali dengan tetap mengutamakan kesehatan.

Ketua BPPD DIY Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Bendara menyampaikan, pariwisata di DIY sudah mulai naik akhir Desember 2020. Namun, setelah ada kebijakan wajib rapid test antigen bagi pelaku perjalanan luar kota, banyak wisa-

tawan menunda perjalanannya karena syarat itu dianggap memberatkan. Pasalnya, jika pergi berempas, biaya yang harus dikeluarkan untuk rapid test antigen saja kurang lebih mencapai Rp 1 juta.

"Pariwisata di DIY terlihat mulai menggeliat setelah kebijakan tes kesehatan menggunakan GeNose bagi pengguna kereta api jarak jauh. Biaya tes GeNose yang terjangkau membuat masyarakat kembali mau bepergian. Dengan GeNose, empat orang hanya menghabiskan

Rp 80.000," ujar GKR Bendara saat hadir dalam edukasi kesiapan protokol kesehatan menghadapi libur Imlek di Stasiun (Tugu) Yogyakarta, Kamis (11/2). Kepala Stasiun Yogyakarta Ade Iskandar mengatakan, ada beberapa alternatif selain GeNose untuk tes kesehatan calon penumpang seperti dengan rapid test di lokasi. Pihaknya tetap konsisten menerapkan prosedur pencegahan Covid-19 baik di area stasiun maupun perjalanan KA di atas KA.

(Ira)-f



GKR Bendara bersama Kepala Stasiun Yogyakarta Ade Iskandar memantau kesiapan protokol kesehatan saat liburan Imlek.

KR-Istimewa

VAKSINASI NAKES DOSIS PERTAMA

275 Orang Tidak Memenuhi Syarat

KULONPROGO (KR) - Kabupaten Kulonprogo dalam pekan ini harus sudah menyelesaikan vaksinasi dosis pertama untuk tenaga kesehatan (nakes). Hingga Kamis (11/2) sudah tervaksin 2.580 nakes dari 3.244 yang mendaftar ulang. Jumlah pendaftar ulang mencapai 104,2 persen dari sasaran awal 3.113. Saat ini sudah 83 persen dari sasaran awal. Ada 389 yang masih ditunda, dan 275 yang tidak memenuhi syarat.

"Target pekan ini termasuk di dalamnya tenaga kesehatan berusia lanjut (lansia) yang masih aktif praktik di Kulonprogo sudah diikutkan untuk vaksinasi. Sabtu kami masih membuka layanan bagi yang masih tercecer," ungkap drg Bani Rahayati MKes, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon-



KR-Dedy EW

Ketua DPRD Gunungkidul Endah Subekti menerima vaksin.

progo, Kamis (11/2).

Untuk tahap kedua, sesuai arahan Kementerian Kesehatan, akan meluaskan sasaran kepada pelayanan publik. Rabu (10/2) siang, Dinkes sudah berkoordinasi dengan Pimpinan OPD dan Lembaga untuk melakukan pendataan awal sasaran. Direncanakan vaksinasi untuk

pelayanan publik dilaksanakan Maret dan April.

Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul, Kamis (11/2) melaksanakan vaksinasi kedua. Sebanyak 26 orang yang semula menerima vaksinasi Sinovac tahap pertama, kembali divaksin Covid-19. Vaksinasi kedua di RSUD Wonosari dihadiri Wakil Bupati Gunungkidul Dr Drs H Immawan Wahyudi MH, Ketua DPRD Endah Subekti Kuntariningsih, Kepala Dinkes Gunungkidul dr Dewi Irawati, Direktur RSUD Wonosari dr Heru Sulistyowati, tokoh agama dan undangan.

Dewi Irawati mengungkapkan, vaksin pertama yang diterima Dinkes Gunungkidul 5.544 dosis, selanjutnya terdapat tambahan 616 dosis. Sudah diberikan untuk ribuan tenaga kesehatan di Gunungkidul.

(Wid/Ded/Bmp)-f

TERMASUK LANSIA DAN IBU MENYUSUI

Kelompok Komorbid Bisa Divaksinasi

JAKARTA (KR) - Kementerian Kesehatan mengirimkan Surat Edaran (SE) kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota terkait pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Dalam Surat Edaran Kemenkes tersebut tercantum salah satunya pelaksanaan vaksinasi bagi kelompok komorbid dengan ketentuan yang harus dipenuhi.

Surat Edaran Nomor HK.02.02/1/368/2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 pada Kelompok Sasaran Lansia, Komorbid dan Penyintas Covid-19, serta Sasaran Tunda itu telah ditandatangani, Kamis (11/2) oleh Plt Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes Dr dr Maxi Rein Rondonuwu DHSM MARS.

"Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional telah menyampaikan kajian bahwa vaksinasi Covid-19 dapat diberikan pada kelompok usia 60 tahun ke atas, komorbid, penyintas Covid-19 dan ibu menyusui

dengan terlebih dahulu dilakukan anamnesa tambahan," kata Maxi.

Pelaksanaan pemberian vaksinasi harus tetap mengikuti petunjuk teknis pelaksanaan vaksinasi Covid-19, antara lain bagi kelompok Lansia, pemberian vaksinasi pada kelompok usia 60 tahun ke atas diberikan dua dosis dengan interval pemberian 28 hari (0 dan 28).

Sementara untuk kelompok komorbid, dalam hal ini hipertensi, dapat divaksinasi kecuali jika tekanan darahnya di atas 180/110 mmHg, dan pengukuran tekanan darah sebaiknya dilakukan sebelum meja skrining. Bagi kelompok komorbid dengan diabetes dapat divaksinasi sepanjang belum ada komplikasi akut.

Bagi kelompok komorbid penyintas kanker dapat tetap diberikan vaksin. Selain itu penyintas Covid-19 dapat divaksinasi jika sudah lebih dari tiga bulan. Begitu pun ibu menyusui dapat juga diberikan vaksinasi. (Ati)-f

MASAADAPTASI KEBIASAAN BARU

BIY Jadi Pintu Masuk WNA

KULONPROGO (KR) - Manajemen PT Angkasa Pura (AP) I sebagai pengelola Yogyakarta International Airport (YIA) atau Bandara Internasional Yogyakarta (BIY), berupaya memastikan kesiapan fasilitas pendukung bersama instansi terkait.

Langkah tersebut merespons Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.GR.03.01/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menkumham No M.HH-01.GR.03.01/2020 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi Tertentu sebagai Tempat Masuk dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru.

"Alhamdulillah BIY termasuk dalam penambahan daftar Tempat Pemeriksaan Imigrasi tertentu sebagai pintu masuk Warga Negara Asing (WNA) dalam masa adaptasi kebiasaan baru. Dalam Keputusan Menkumham tersebut, BIY ditambahkan sebagai Tempat Pemeriksaan Imigrasi Tertentu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat di Yogyakarta," kata PTS General Manager (GM) BIY Agus Pandu Purnama, Jumat (12/2).

Agus mengatakan, pihaknya langsung berkoordinasi bersama stakeholder terkait, Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta, Satgas Covid-19 DIY, Kantor Kesehatan Pelabuhan, Bea Cukai, Bappeda, BPBD DIY, Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BBTKLPP) Yogyakarta, Karantina Ikan dan Karantina Pertanian.

Koordinasi dilakukan setelah dirinya

bersama jajaran dan pimpinan instansi terkait bertemu Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, mengenai potensi dan kesiapan pendukung BIY sebagai pintu masuk penerbangan internasional khususnya di masa pandemi Covid-19.

Diungkapkan, dalam Permenkumham 26/2020, kategori WNA yang diperbolehkan memasuki wilayah Indonesia adalah WNA pemegang paspor diplomatik, izin tinggal terbatas, izin tinggal tetap dan WNA yang memiliki izin dari Kementerian/Lembaga terkait.

Pelaku perjalanan internasional yang berstatus Warga Negara Indonesia (WNI) dari luar negeri diizinkan memasuki Indonesia wajib mengikuti protokol kesehatan, seperti WNI dan WNA (sesuai kriteria) harus mengikuti persyaratan menunjukkan hasil negatif RT-PCR maksimal 3x24 jam sebelum keberangkatan, mengisi e-HAC dan melakukan tes ulang RT-PCR saat tiba, serta wajib melaksanakan karantina selama 5x24 jam. Lokasi karantina WNI ini berada pada area khusus, yang akan ditentukan oleh Pemda DIY, dengan kondisi hotel atau penginapan yang telah mendapatkan sertifikasi karantina Covid-19 oleh Kementerian Kesehatan dengan biaya mandiri.

"Prinsipnya seluruh instansi atau lembaga yang memiliki tugas dan tanggung jawab melayani penerbangan internasional dan mengimplementasikan Surat Edaran Satgas Covid-19 menyatakan siap dan mendukung. (Rul)-f

Pilpres-Pilkada Dibarengkan, Lemahkan Parpol

JAKARTA (KR) - Dewan Pembina Perludem Titi Angraini menilai, pilkada yang digelar bersamaan dengan pilpres justru melemahkan partai politik. Bahkan bisa dibayangkan dari implikasi pemilu dan pilkada. Pertama, kompleksitas Pemilu 2019 berpotensi berulang di 2024. Karena regulasi pada level UU tidak mengalami perubahan.

"Sejatinnya dikhawatirkan, akan makin melemahkan partai politik. Karena biasanya korelasi pemilu dan parpol meningkat saat ada agenda elektoral," kata Titi Angraini dalam sarasehan kebangsaan secara daring 'Pemilu dan Masa Depan Demokrasi Indonesia' di Jakarta, Kamis (11/2). Kegiatan ini diselenggarakan Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju (DN PIM) dengan narasumber lain anggota DPR RI Dr Mardani Ali Sera, Guru Besar Ilmu Politik Universitas Nasional Prof Dr TB Massa Djafar, anggota KPU RI 2007-2012 Dr Endang Sulastri, peneliti senior LIPI Prof Dr Siti Zuhro. Pertemuan dibuka

Ketua Umum DN PIM Prof Dr Din Syamsuddin.

Sebagaimana diketahui, pembahasan RUU Pemilu di Komisi II DPR RI terhenti karena mayoritas fraksi sepakat menolak dengan alasan tak ada urgensi dan masih perlu fokus pada penanganan pandemi virus korona. Kini tinggal PKS dan Demokrat yang masih berusaha agar RUU Pemilu dibahas kembali.

Jika pemilu digelar serentak pada 2024, sebutnya, ada banyak hal yang perlu dipersiapkan. Mulai dari persiapan pilpres yang kemudian dilanjutkan dengan persiapan pilpres, lalu ada juga pergantian anggota KPU

baik di pusat dan provinsi. Menurut Titi, interaksi antara parpol dan elektoral biasanya muncul 5 tahun sekali jelang pemilu.

Kemudian muncul lagi ketika ada pilkada. Kini, pemilu yang membuat konstituen dan parpolnya dipadatkan menjadi dalam tahun yang sama. Menurut Titi, meski pemerintah dan parpol tidak menghendaki perubahan jadwal pemilu dan pilkada, perbaikan UU untuk memperbaiki permasalahan teknis dan keadilan elektoral, tetap mendesak dilakukan," ujarnya.

Menata Ulang

Sebelumnya, peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Dr Siti Zuhro menyatakan, saat ini merupakan momentum tepat menata ulang kembali sistem demokrasi dan praktik pemilu Indonesia. Karena sudah 22 tahun mempraktikkan sistem demokrasi dimana perubahan-perubahannya itu tidak hanya fundamental tapi melompat-lompat luar biasa. (Fsy)-f

DITUDUH RADIKAL DAN ANTI PANCASILA Din Syamsuddin Dilaporkan ke Komisi ASN

JAKARTA (KR) - Laporan Gerakan Anti-radikalisme Alumni ITB (GAR-ITB) kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang menuduh mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin radikal dan anti-Pancasila menuai tanggapan. Muhammadiyah menegaskan, laporan tersebut keliru, bahkan salah alamat. Mengingat Din dikenal sebagai seseorang yang sangat aktif mendorong moderasi beragama dan kerukunan intern serta antarumat beragama, baik di dalam maupun luar negeri.

"Pak Din adalah tokoh yang menggagas konsep negara Pancasila sebagai Darul Ahdi wa Syahadah di PP Muhammadiyah. Sampai akhirnya menjadi keputusan resmi Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makassar" tandas Sekretaris Umum (Sekum) PP Muhammadiyah Prof Dr Abdul Mu'ti dalam siaran pers yang disampaikan ke media, Jumat petang (12/2). Pernyataan ini sebagai tanggapan atas adanya pihak yang melaporkan Din Syamsuddin sebagai ASN yang radikal.

Dalam periode pertama kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Din Syamsuddin diangkat sebagai utusan khusus Presiden untuk dialog dan kerja sama antaragama dan peradaban. Dengan posisi tersebut, Din telah memprakarsai dan menyelenggarakan pertemuan ulama dunia di Bogor. "Pertemuan tersebut melahirkan Bogor Message yang berisi tentang Wasatiah Islam, Islam yang moderat. Bogor Message adalah salah satu dokumen dunia yang disejajarkan dengan Amman Message dan Common Word," ujarnya. (Fsy)-f

TERAPI PLASMA KONVALESEN Perbesar Peluang Kesembuhan

JAKARTA (KR) - Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset Inovasi Nasional (Menristek/Kepala BRIN) Bambang PS Brodjonegoro mengatakan, terapi plasma konvalesen merupakan alternatif tambahan untuk penanganan pasien Covid-19 di Indonesia saat ini. Terapi ini dapat berkontribusi untuk memperbesar atau meningkatkan peluang kesembuhan pasien.

"Pandemi Covid-19 belum selesai, karena itu Menristek/BRIN terus berupaya menanggulangi pandemi dengan riset dan inovasi. Kita selalu berupaya untuk membuat penularan atau jumlah yang terinfeksi menjadi lebih sedikit dan mendarat kurvanya. Hal lain yang bisa kita tonjolkan, peningkatan jumlah kesembuhan dan pengurangan jumlah kematian secara signifikan, di situlah terapi plasma konvalesen memainkan peranan penting," jelas Bambang saat menjadi pembicara kunci pada webinar virtual Penanganan Covid-19: Harapan pada Plasma Konvalesen di Jakarta, Kamis (11/2).

Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksone M mengimbau para penyintas untuk bersedia melakukan donor plasma konvalesen untuk membantu pasien Covid-19. Plasma konvalesen dipercaya dapat membantu menyembuhkan gejala Covid-19, sehingga diharapkan dapat mengurangi risiko kematian pada para penderitanya.

Bambang mendorong agar plasma konvalesen bisa diakui untuk terapi penanganan Covid-19. Diharapkan uji klinik yang saat ini sedang dilakukan dapat memperkuat peran terapi plasma konvalesen sebagai terapi alternatif pengobatan Covid-19. (Ati)-f



KR-Asrul Sari

BIY masuk daftar Tempat Pemeriksaan Imigrasi tertentu sebagai pintu masuk WNA pada masa adaptasi kebiasaan baru.